

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) SALURKAN Rp250 JUTA UNTUK KORBAN BENCANA DI BANJARNEGARA



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/01/OK-12-BNPB-salurkan-250-juta-dan-Peralatan-Logistik-untuk-Korban-Bencana-di-Banjarnegara.jpg>

Isi Berita:

HALO BANJARNEGARA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyerahkan bantuan senilai Rp 250 juta kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, untuk membantu pengungsi korban bencana longsor di Kabupaten Banjarnegara.

Bantuan diserahkan oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Logpal) BNPB, Lilik Kurniawan, kepada Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, di rumah dinas bupati, Kamis (11/1/2024).

Lilik Kurniawan mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk membantu penanganan para pengungsi akibat bencana longsor di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

“Selain uang tunai, kami juga menyerahkan bantuan peralatan logistik yang dibutuhkan di lapangan,” kata dia, seperti dirilis banjarnegarakab.go.id.

Lilik menambahkan, kehadiran BNPB di Banjarnegara yang pertama untuk menyerahkan bantuan, karena dukungan itu penting karena untuk menjalankan kegiatan penanganan.

Ia mengatakan, Pemerintah daerah perlu dana operasional karena pada awal tahun biasanya anggaran belum keluar sehingga perlu di dukung dengan dana siap pakai.

“Kami juga ingin memastikan upaya penanganan itu dilakukan dengan baik, jadi setelah mendapat laporan kita akan meninjau kelapangan untuk memastikan bahwa semua pengungsi tertangani dengan baik,” lanjutnya

Lilik menambahkan, kewaspadaan nanti juga akan kita lakukan, karena musim penghujan baru mulai, apalagi setelah sebelumnya banyak tanah yang retak dan dikhawatirkan akan terjadi longsor.

“Banjarnegara itu punya sejarah longsor besar seperti di Sijeruk dan Jemblung yang terjadi beberapa waktu lalu, sehingga perlu terus dilakukan kesiapsiagaan,” lanjutnya Sementara PJ Bupati Tri Harso Widirahmanto, mengatakan saat ini Pemkab Banjarnegara sudah siap 24 jam, untuk menangani bencana di wilayahnya, termasuk distribusi logistik untuk para korban terdampak bencana longsor.

“Logistik untuk korban bencana sudah tercukupi, sementara untuk relokasi juga sudah kami siapkan untuk di bangun hunian sementara, sedangkan untuk hunian tetap nantinya akan menunggu kajian terlebih dahulu dari tim geologi ,” Kata Tri Harso.

Tri Harso menambahkan, karena seringnya terjadi bencana alam di Banjarnegara membuat tim penanganan bencana semakin kuat, dibantu relawan dan stake holder tentunya.

“418 kejadian bencana di Banjarnegara seperti tanah longsor, banjir dan lainnya bisa tertangani, karena sejak awal Desember kita sudah melakukan siaga bencana yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi tanggap darurat bencana,” tambahnya

Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Aris Sudaryanto mengatakan, longsor di Dukuh Batur dan Dukuh Sipedang, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, terjadi dipicu hujan deras.

Longsor mengakibatkan sejumlah rumah mengalami rusak berat, sedang dan ringan. Dan saat ini sebanyak 18 keluarga di Desa Sipedang masih mengungsi akibat longsor yang terjadi pada Senin, 8 Januari 2024 lalu.

“18 keluarga itu terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak berat atau terancam akibat pergerakan tanah dan saat ini kita sedang siapkan hunian sementara, ” katanya

Ia mengatakan, tipe pergerakan tanah di Sipedang adalah longsor rayapan. Pergerakannya pelan namun semakin lama kian parah hingga merusak bangunan. Pergerakan semakin parah saat musim penghujan.

Saat memasuki kemarau, pergerakan tanah biasanya berhenti dan rumah relatif aman untuk ditempati kembali.

Longsor juga terjadi di beberapa titik di wilayah Banjarnegara, seperti di Desa Jembangan, Tlaga dan Desa Punggelan Kecamatan Punggelan; serta Desa Pasegeran Kecamatan Pandanrum dan Desa Aribaya Kecamatan Pagentan.

BPBD Banjarnegara dan tim gabungan sudah melakukan penanganan di lokasi bencana longsor dengan melakukan kajian, pembersihan material longsor dan pembongkaran rumah yang alami rusak berat.

“Kami juga memberikan pelayanan kesehatan dan distribusi logistik dasar seperti tenda keluarga, makanan siap saji, sembako, terpal, hygiene kit, selimut, matras, velbed, genset dan alat sedot air untuk para pengungsi,” lanjutnya.

Terkait dengan penanganan bencana lainnya di Banjarnegara, Pemkab Banjarnegara melalui BPBD dan Dinas Sosial, sedang menyelesaikan pembuatan sumur bor di 4 titik di Banjarnegara.

Sumur tersebut berada di Desa Duren Kecamatan Pagedongan, Desa Petir dan Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara serta Desa Jalantuda Kecamatan Mandiraja yang selalu mengalami kekeringan ekstrim saat musim kemarau.(HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/bnpb-salurkan-250-juta-untuk-korban-bencana-di-banjarnegara>, “BNPB Salurkan 250 Juta untuk Korban Bencana di Banjarnegara”, tanggal 18 Januari 2024.
2. <https://banjarnegarakab.go.id/main/bnpb-salurkan-250-juta-dan-peralatan-logistik-untuk-korban-bencana-di-banjarnegara/>, “BNPB salurkan 250 juta dan Peralatan Logistik untuk Korban Bencana di Banjarnegara”, tanggal 11 Januari 2024.
3. <https://www.bnpb.go.id/en/berita/bnpb-serahkan-dukungan-untuk-penanganan-bencana-tanah-longsor-banjarnegara>, “BNPB Serahkan Dukungan untuk Penanganan Bencana Tanah Longsor Banjarnegara”, tanggal 13 Januari 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
- Keadaan darurat meliputi:⁶
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*